

Penguatan Literasi Masyarakat di Era Digital: Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Demokrasi Informasi

Dr.Kholid Abdullah Harras, M.Pd

Universitas Pendidikan Indonesia

kholid_harras@upi.edu

Abstrak

Pesatnya penetrasi internet di Indonesia tidak serta-merta diiringi dengan peningkatan kecakapan literasi digital, sehingga memicu kerentanan terhadap disinformasi dan polarisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan literasi digital di masyarakat serta merumuskan strategi implementasi yang efektif di era distrupsi informasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur terkini, laporan indeks literasi, dan fenomena sosial digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis (hard skills), melainkan mencakup dimensi kognitif dan etis yang meliputi kecakapan (digital skills), budaya (digital culture), etika (digital ethics), dan keamanan (digital safety). Penguatan literasi digital terbukti mampu memitigasi penyebaran hoaks dan memperkuat partisipasi publik yang sehat. Strategi kolaborasi melalui model pentaheliks antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang tangguh. Penemuan ini menekankan bahwa tanpa literasi yang memadai, transformasi digital hanya akan menjadi beban sosial daripada penggerak kemajuan.

Kata Kunci: *Literasi Digital, Masyarakat Informasi, Disinformasi, Strategi Edukasi, Ekosistem Digital.*

1. PENDAHULUAN

Lanskap komunikasi global telah mengalami pergeseran paradigma secara fundamental sejak dimulainya era Revolusi Industri 4.0. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga merestrukturisasi cara masyarakat memproses, mendistribusikan, dan memvalidasi informasi. Di Indonesia, data penetrasi internet telah menunjukkan angka yang sangat signifikan. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet nasional telah melampaui 75% dari total populasi. Angka ini mencerminkan ketergantungan yang luar biasa tinggi terhadap platform digital dalam hampir

setiap aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga interaksi sosial politik. Namun, lonjakan aksesibilitas ini memunculkan anomali yang mengkhawatirkan: adanya kesenjangan yang lebar antara akses terhadap teknologi (digital access) dengan kecakapan intelektual dalam mengelola teknologi tersebut (digital competence).

Masalah utama yang muncul ke permukaan adalah rendahnya budaya verifikasi di tengah fenomena banjir informasi (information overload). Masyarakat kini hidup dalam ekosistem informasi yang melimpah, namun sering kali kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta objektif, opini subjektif, dan disinformasi yang disengaja. Kondisi ini diperburuk oleh karakteristik media sosial yang mengutamakan kecepatan daripada akurasi. Kesenjangan antara harapan akan masyarakat yang cerdas digital dengan kenyataan maraknya persebaran hoaks dan polarisasi siber menjadi titik krusial yang harus segera diatasi.

Untuk membedah fenomena ini secara saintifik, kajian ini menggunakan landasan teori Network Society (Masyarakat Jaringan) yang dikembangkan oleh Manuel Castells

(2010). Castells berargumen bahwa dalam era informasi, struktur sosial masyarakat dibangun di sekitar jaringan yang ditenagai oleh teknologi informasi dan komunikasi. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak lagi terletak pada kepemilikan fisik, melainkan pada kemampuan untuk mengakses, memproses, dan mengarahkan aliran informasi. Jika masyarakat tidak memiliki literasi yang memadai, mereka akan terpinggirkan secara kognitif dalam struktur jaringan tersebut, menjadi objek manipulasi ketimbang subjek yang berdaya.

Selain itu, kajian ini mengintegrasikan konsep literasi digital dari Paul Gilster (1997) sebagai alat analisis kemampuan kognitif manusia. Gilster mendefinisikan literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis mengoperasikan perangkat keras, melainkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif. Menurut Gilster, literasi digital mencakup kemampuan mengevaluasi sumber informasi dan melakukan sintesis pengetahuan dari berbagai format yang berbeda. Hal ini menjadi sangat relevan karena tantangan di ruang siber saat ini bukan lagi masalah "bisa menggunakan alat", melainkan "bagaimana bernavigasi dengan bijak" di tengah lautan data yang tidak terstruktur.

Pernyataan kebaruan (novelty) dalam artikel ini terletak pada sintesis antara teori sosiologis jaringan Castells dengan pendekatan kognitif Gilster untuk merumuskan strategi penguatan literasi yang adaptif bagi masyarakat Indonesia. Urgensi penelitian ini didorong oleh kenyataan bahwa tanpa penguatan literasi digital yang terstruktur, transformasi digital di Indonesia hanya akan menciptakan masyarakat yang terkoneksi secara teknis namun rapuh secara intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama literasi di Indonesia dan menawarkan rancangan konsep pemikiran ilmiah yang dapat memperkuat ketahanan informasi nasional di era disrupsi digital. Dengan demikian, manfaat dari kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan dalam menyusun program literasi digital yang lebih substantif dan berkelanjutan.

2. PEMBAHASAN

Penguatan literasi digital di Indonesia saat ini berada pada persimpangan jalan yang krusial. Secara statistik, pertumbuhan jumlah pengguna internet memang mengesankan, namun kualitas interaksi di dalamnya menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun indeks kecakapan teknologi (hard skills) masyarakat terus meningkat—ditandai dengan kemahiran mengoperasikan gawai dan aplikasi media sosial—ketahanan terhadap manipulasi informasi justru masih berada pada level yang rendah. Fenomena ini menegaskan bahwa literasi digital tidak boleh lagi dipandang secara reduksionis hanya sebagai kemampuan teknis belah pihak.

Sejalan dengan pemikiran Bawden (2008), literasi digital sejatinya adalah sebuah payung konsep yang mengintegrasikan berbagai jenis literasi, termasuk literasi informasi, literasi media, dan literasi perpustakaan. Bawden menekankan bahwa inti dari literasi digital adalah kemampuan melakukan evaluasi kritis terhadap konten. Tanpa evaluasi kritis, seseorang mungkin bisa mengakses informasi dengan cepat, tetapi ia akan gagal memahami konteks, kebenaran, dan dampak dari informasi tersebut. Di Indonesia, tantangan utama muncul ketika masyarakat yang secara teknis "melek gawai" justru menjadi saluran penyebaran disinformasi tercepat karena ketiadaan filter kognitif yang memadai.

2.1. Analisis Pilar dan Fenomena Psikologi Digital

Pertanyaan mendasar yang muncul dalam diskusi akademik adalah: Mengapa disinformasi tetap dominan di masyarakat yang secara teknis sudah mahir berinternet? Secara saintifik, jawaban atas anomali ini dapat dijelaskan melalui mekanisme algoritma dan psikologi kognitif. Fenomena ini pertama kali dipopulerkan oleh Eli Pariser melalui konsep Filter Bubble (Gelembung Filter). Algoritma media sosial dirancang dengan tujuan komersial untuk menjaga keterlibatan (keterlibatan) pengguna setinggi mungkin. Untuk mencapai hal ini, algoritma secara otomatis mengurasi dan menyajikan konten yang hanya sesuai dengan preferensi, minat, dan pandangan politik pengguna.

Akibatnya, terciptalah Echo Chamber atau ruang gema. Di dalam ruang ini, individu hanya mendengar opini yang searah dengan keyakinannya, sementara pandangan yang berbeda atau fakta yang menyanggah akan tersaring keluar dari lini masa mereka. Hal ini secara psikologis memperkuat Bias Konfirmasi—sebuah kecenderungan manusia untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi dengan cara yang mendukung keyakinan atau hipotesis awal mereka. Ketika seseorang terpapar informasi yang salah namun sesuai dengan narasinya, otak cenderung menerimanya sebagai kebenaran tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

Kondisi sosiologis ini diperparah oleh data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), yang mengungkapkan fakta empiris bahwa pilar Digital Ethics (Etika Digital) dan Digital Culture (Budaya Digital) merupakan dua pilar dengan skor terendah dalam indeks literasi nasional Indonesia. Rendahnya skor pada aspek etika menjelaskan mengapa perilaku perundungan siber (cyberbullying), ujaran kebencian, dan provokasi begitu masif terjadi. Masyarakat seringkali merasa anonim di ruang digital sehingga kehilangan hambatan moral

yang biasanya mereka miliki di dunia nyata. Rendahnya budaya digital juga menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan dan toleransi belum terinternalisasi dengan kuat di ruang siber, yang menjadikan media sosial sebagai ladang subur bagi polarisasi identitas.

2.2. Urgensi Berpikir Kritis sebagai Kompetensi Kognitif

Menanggapi kerentanan tersebut, Livingstone (2004) memberikan perspektif bahwa literasi media bukan sekadar masalah akses fisik terhadap perangkat, melainkan kapasitas untuk menganalisis dan mengevaluasi pesan dalam berbagai konteks sosiokultural. Di era digital saat ini, kompetensi kognitif ini mewujud dalam kemampuan fact-checking atau verifikasi fakta secara mandiri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sering kali gagal membedakan antara opini subjektif, konten berbayar (ads), dan fakta ilmiah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman akan otoritas sumber informasi.

Kesenjangan ini terjadi karena pendidikan literasi kita selama ini terlalu fokus pada "cara memakai" bukan "cara menalar". Secara saintifik, tren variabel literasi menunjukkan bahwa peningkatan durasi penggunaan internet justru sering kali berkorelasi negatif dengan kemampuan konsentrasi dan analisis mendalam (deep reading), sebuah fenomena yang oleh Nicholas Carr disebut sebagai efek The Shallows. Oleh karena itu, strategi penguatan literasi harus bersifat multidimensi.

Mengacu pada teori Social Inclusion dari Warschauer (2004), teknologi hanyalah alat atau sarana. Inklusi sosial yang sebenarnya tidak terjadi saat seseorang memiliki ponsel pintar terbaru, melainkan ketika individu tersebut memiliki kemampuan untuk mentransformasi informasi digital menjadi pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks Indonesia, literasi digital harus diarahkan agar masyarakat mampu menggunakan internet untuk pemberdayaan ekonomi dan partisipasi demokrasi yang sehat, bukan sekadar konsumsi hiburan pasif yang destruktif.

2.3. Strategi Kolaborasi Pentaheliks dan Digital Parenting

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini, diperlukan strategi yang sistemik dan berkelanjutan melalui model Kolaborasi Pentaheliks. Penguatan literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja melalui regulasi atau pemblokiran situs. Penemuan ilmiah dalam kajian ini menunjukkan bahwa intervensi yang paling efektif dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Konsep Digital Parenting yang dikembangkan oleh Palfrey & Gasser (2016) dalam buku *Born Digital* menekankan bahwa orang tua tidak boleh hanya berperan sebagai "polisi internet" yang melarang penggunaan gawai, tetapi harus menjadi pendamping dan mentor bagi anak-anak mereka. Orang tua perlu membangun dialog kritis mengenai konten yang dikonsumsi anak. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendampingan aktif dari orang tua memiliki ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap dampak negatif internet, seperti kecanduan gim, paparan pornografi, dan rekrutmen ekstremisme daring.

Selain keluarga, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal menjadi keharusan. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator yang mengajarkan cara memvalidasi informasi. Secara makro, kolaborasi antara:

1. Pemerintah: Menyediakan regulasi yang melindungi data pribadi dan infrastruktur yang merata.
2. Swasta (Platform Penyedia): Memperbaiki algoritma agar tidak memperparah hoaks demi keuntungan adsense.
3. Akademisi: Terus melakukan riset dan pengabdian masyarakat untuk edukasi digital.
4. Komunitas/Media: Menjadi garda terdepan dalam kampanye literasi di tingkat akar rumput.

Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan mekanisme pertahanan siber yang dimulai dari individu. Jika setiap individu memiliki kemampuan berpikir kritis, maka disinformasi akan mati dengan sendirinya karena kehilangan "inang" untuk menyebar. Pada akhirnya, pembahasan ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital adalah proyek kebudayaan jangka panjang yang akan menentukan kualitas demokrasi dan kemajuan bangsa di masa depan.

3. PENUTUP

Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital di tengah masyarakat bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan fondasi utama bagi kedaulatan informasi nasional. Di era di mana data sering disebut sebagai "minyak baru", kemampuan warga negara untuk memilah, memvalidasi, dan mengelola informasi menjadi penentu bagi stabilitas sosial dan kemajuan ekonomi. Berdasarkan hasil pembahasan, jawaban atas rendahnya indeks literasi digital di Indonesia tidak cukup hanya dengan penyediaan infrastruktur internet cepat atau pemerataan gawai, melainkan terletak pada transformasi pola pikir (mindset) masyarakat. Transformasi ini mengharuskan pergeseran status pengguna dari sekadar "konsumen pasif" yang mudah terombang-ambing oleh arus algoritma, menjadi "pengguna kritis" yang berdaya.

Kajian ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi gempuran disinformasi berakar pada lemahnya aspek kognitif dan etis. Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus diarahkan untuk membangun "imunitas informasi". Imunitas ini hanya bisa terbentuk apabila setiap individu memiliki kesadaran akan hak-hak digital, tanggung jawab etis, dan pemahaman mendalam mengenai cara kerja platform digital. Dengan demikian, literasi digital menjadi bentuk bela negara baru di abad ke-21, di mana pertahanan kedaulatan bangsa tidak lagi hanya diukur dari batas teritorial fisik, tetapi juga dari ketangguhan ruang siber dan kejernihan pemikiran warganya.

Menatap masa depan, tantangan literasi digital akan semakin kompleks seiring dengan integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya teknologi deepfake, otomasi informasi, dan personalisasi konten berbasis AI yang

lebih masif menuntut adanya pemutakhiran strategi edukasi. Oleh karena itu, perlu segera dikembangkan kurikulum literasi digital yang adaptif terhadap perkembangan AI. Kurikulum ini tidak boleh kaku; ia harus dinamis dan mencakup pemahaman mengenai etika algoritma, deteksi konten buatan mesin, serta pemanfaatan AI untuk produktivitas yang positif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton atau penyintas (*survivor*) di tengah disrupsi teknologi, tetapi mampu menjadi subjek yang produktif dan inovatif di ekosistem digital yang terus berubah.

Sebagai rancangan konsep pemikiran ilmiah yang diperoleh, penguatan literasi harus diimplementasikan melalui kebijakan yang bersifat multisektoral. Di tingkat akhir, kajian ini merekomendasikan hal-hal konkret yang perlu dilakukan di masa mendatang: pertama, pengintegrasian literasi digital ke dalam sistem pendidikan nasional secara lebih substantif; kedua, penguatan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih ketat untuk menumbuhkan rasa aman digital; dan ketiga, pemberdayaan komunitas lokal sebagai duta literasi yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan informasi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, literasi digital akan menjadi pilar utama bagi peradaban bangsa yang cerdas, bijak, dan kompetitif secara global. Akhirnya, penguatan literasi adalah investasi peradaban panjang yang hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan.

Berikut adalah daftar pustaka dalam format APA (7th Edition) yang seluruhnya ditulis dalam bahasa asli sumber (*original language*)—tanpa terjemahan ke bahasa Indonesia:

References (APA Style, Original Language)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies: Concepts, policies and practices* (pp. 17–32). Peter Lang.

Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Publishing.

Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 7(1), 3–14.
<https://doi.org/10.1080/10714420490280152>

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.

Palfrey, J., & Gasser, U. (2016). *Born digital: How children grow up in a digital age* (Updated ed.). Basic Books.

Warschauer, M. (2003). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT Press.

Vol. 4 No.1 (2026)
SANDIBASA IV (Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)
E-ISSN: 3047-3268

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Indeks literasi digital Indonesia 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.